

PERAN TIM KERJA KEUANGAN DALAM MENGELOLA LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dian Ayu Setyaningrum¹, Eddy Wahyudi²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

(diannas3004@gmail.com, ediwahyudi@untag-sby.ac.id)

ABSTRAK

Pengelolaan anggaran daerah yang akuntabel dan transparan menjadi kunci dalam mendukung efektivitas program pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan. Tim kerja keuangan memiliki peran strategis dalam merencanakan dan menyusun laporan keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna mendukung kegiatan operasional dan program prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Metode pelaksanaan mencakup observasi awal, pelatihan teknis, pendampingan, Focus Group Discussion (FGD), dan evaluasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan edukatif mampu meningkatkan kompetensi tim keuangan dalam menyusun anggaran berbasis kinerja dan pelaporan yang transparan. Kegiatan ini juga mendorong koordinasi lintas bidang dan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel.

Kata kunci : Laporan keuangan, pad, tim kerja keuangan dinas kesehatan provinsi jawa timur

ABSTRACT

Accountable and transparent regional budget management is key in supporting the effectiveness of public service programs, especially in the health sector. The finance working team has a strategic role in planning and preparing financial reports sourced from Regional Original Revenue (PAD), to support operational activities and priority programs of the East Java Provincial Health Office. The implementation method includes initial observation, technical training, mentoring, Focus Group Discussion (FGD), and participatory evaluation. The results showed that the participatory and educative approach was able to improve the competence of the finance team in preparing performance-based budgets and transparent reporting. This activity also encourages cross-field coordination and strengthens more accountable local financial governance.

Keywords : Financial report, pad, East Java provincial health office finance working team

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Salah satu sumber pendanaan yang krusial bagi pelaksanaan program pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah cerminan kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan penuh kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengelolaan PAD yang optimal menjadi aspek yang sangat penting, khususnya dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas (Lathifah, 2023). PAD merupakan salah satu sumber pendanaan utama dalam mendukung program pelayanan publik, termasuk di bidang kesehatan, sehingga peran strategis tim keuangan tidak dapat dikesampingkan (Zeho, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa pendanaan kesehatan bertujuan untuk mendanai pembangunan kesehatan secara berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya. Pembiayaan kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pembiayaan kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalan, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan sumber lain.

Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah peraturan yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bertujuan untuk mengesahkan dan mengikat secara hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023, Dinas Kesehatan bertanggung jawab membantu Gubernur dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program, serta koordinasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, keberadaan PAD menjadi penopang berbagai program kesehatan, seperti peningkatan layanan rumah sakit, pengadaan alat kesehatan, pemberantasan penyakit menular, hingga edukasi masyarakat tentang gaya hidup sehat (Muhammad, 2022).

Anggaran kesehatan di Provinsi Jawa Timur (Dinas Kesehatan dan RS UOBK serta UPT) tahun 2023 merupakan anggaran yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pemerintah Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur (APBD Provinsi) dan APBN Dekonsentrasi. Alokasi APBD Dinas Kesehatan Provinsi untuk bidang kesehatan yang terdistribusi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 647.436.332.442,00 (10,9%) dengan alokasi belanja operasi sebesar Rp. 643.877.359.092,00 dan alokasi belanja modal sebesar Rp. 3.558.973.350,00. Selain itu, terdapat anggaran dari RS UOBK dan UPT sebesar Rp. Rp5.276.232.443.555,61 (88,79%). Secara keseluruhan, persentase APBD Provinsi Jawa Timur untuk belanja kesehatan adalah 99,68%.

Disamping APBD provinsi, pembiayaan kesehatan di Provinsi Jawa Timur juga berasal dari APBN Dana Dekonsentrasi, dimana pada tahun 2023 alokasi Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp. 18.834.341.000,00 (0,32%). Dari gambaran alokasi anggaran kesehatan di Provinsi Jawa Timur tersebut, sumber anggaran terbesar adalah dari APBD Provinsi Jawa Timur, yaitu 99,68%, sedangkan anggaran kesehatan bersumber APBN memberikan kontribusi sebesar 0,32%. Berdasarkan kabupaten dan kota untuk realisasi anggaran kesehatan terbanyak yaitu kota Surabaya dan kebutuhan dana paling sedikit yaitu Kota Batu. Anggaran dana kesehatan per kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2023 cenderung meningkat dari tahun sebelumnya.

PAD dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan adanya perencanaan dan pelaporan

keuangan yang baik dan terstruktur. Dalam hal ini, tim kerja keuangan memiliki peran dalam mengelola administrasi keuangan, menyusun perencanaan anggaran, serta melaksanakan verifikasi dan pelaporan keuangan guna menjamin efektivitas serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Tim kerja keuangan bertanggung jawab dalam menyusun dan mengelola anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, memastikan kelancaran proses administrasi keuangan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah undang-undang ini mengatur tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan anggaran keuangan daerah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Tim Kerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Beberapa di antaranya yaitu fungsi pengendalian internal terhadap pelaksanaan anggaran menghadapi tantangan apabila tidak didukung oleh sistem monitoring, evaluasi, dan SDM yang memadai, terutama dalam mendeteksi penyimpangan anggaran dan melakukan penyesuaian. Serta cakupan tugas Tim Kerja Keuangan yang sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaporan, hingga pengendalian, berpotensi dapat menimbulkan beban kerja yang tinggi dan memengaruhi kualitas kinerja apabila tidak didukung dengan sistem kerja yang efisien dan sumber daya yang memadai.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan terhadap fungsi pengendalian internal melalui penyediaan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. Hal ini penting mengingat ketidakefisienan dalam pengendalian dapat menghambat pada penyimpangan anggaran dan memperlambat proses penyesuaian kebijakan anggaran. Selain itu, cakupan tugas tim kerja keuangan yang sangat luas mulai dari tahap perencanaan, pelaporan, hingga pengendalian juga menuntut adanya sistem kerja yang efisien serta dukungan sumber daya yang memadai agar kualitas kinerja dapat tetap terjaga dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah dapat tercapai secara optimal.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas tim kerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam merencanakan serta menyusun laporan keuangan pengelolaan PAD secara akuntabel dan efisien. Kegiatan pengabdian difokuskan pada pemberdayaan melalui pelatihan teknis, pendampingan, serta diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) yang bersifat dua arah. Lokasi kegiatan pengabdian dilaksanakan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dengan penempatan pada tim kerja keuangan, termasuk staf bagian perencanaan dan pelaporan keuangan, serta sub koordinator atau pejabat fungsional terkait pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.

Dalam pelaksanaannya, metode yang digunakan meliputi observasi langsung melalui wawancara dan pengajuan pertanyaan kepada pegawai tim kerja keuangan, pelaksanaan pembelajaran lapangan di bidang keuangan, pengumpulan dokumentasi disertai pencatatan informasi penting untuk referensi penyusunan tugas, serta penyusunan laporan akhir yang memuat seluruh hasil dan temuan selama kegiatan magang berlangsung.



Gambar 1. Bagan Alur kegiatan Magang

HASIL dan PEMBAHASAN

Dalam struktur organisasi perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, tim kerja keuangan memegang peranan penting dalam mengelola dan mengarahkan jalannya perencanaan serta penyusunan laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan Perencanaan Anggaran Daerah (PAD). Peran awal tim kerja keuangan dalam siklus pengelolaan PAD dimulai dari proses perencanaan anggaran. Tim kerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan berdasarkan rencana program dan kegiatan yang telah dirancang, baik yang bersifat operasional maupun pengembangan layanan kesehatan. Tim kerja keuangan juga berperan menyusun rencana anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) agar penggunaan anggaran dapat diukur secara kuantitatif melalui indikator output.

Dalam hal pelaporan, tim kerja keuangan bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang menggambarkan secara menyeluruh penggunaan anggaran daerah, khususnya yang bersumber dari PAD. Penyajian laporan ini harus mengikuti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Melalui laporan ini, Dinas Kesehatan dapat mengevaluasi capaian program dan kegiatan, serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pengelolaan anggaran di masa mendatang. Tim kerja keuangan juga berperan dalam menyiapkan dokumen pendukung audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.

Selain merencanakan dan menyusun laporan, tim kerja keuangan juga memiliki fungsi pengendalian internal terhadap pelaksanaan anggaran. Tim kerja keuangan melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tim kerja keuangan akan mengidentifikasi adanya penyimpangan penggunaan anggaran, mengatur revisi anggaran bila diperlukan, serta memberikan rekomendasi perbaikan administratif atau teknis dalam pengelolaan anggaran. Pengendalian ini penting karena PAD bersifat fluktuatif dan tergantung pada potensi pendapatan daerah yang bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, regulasi pusat, dan partisipasi masyarakat. Maka, fleksibilitas dan kecepatan analisis dari tim keuangan sangat dibutuhkan.

Tim kerja keuangan tidak bekerja secara terpisah, melainkan harus menjalin koordinasi dengan berbagai bidang teknis di Dinas Kesehatan, seperti bidang pelayanan kesehatan, sumber daya manusia, farmasi, dan kesehatan masyarakat. Informasi dari tiap bidang menjadi dasar penting bagi tim keuangan dalam menyusun anggaran yang responsif terhadap kebutuhan layanan kesehatan masyarakat Jawa Timur.



Gambar 2. Diskusi terkait Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan penyusunan laporan keuangan yang baik, tim keuangan turut mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan anggaran kesehatan. Laporan keuangan yang disusun secara profesional dan dipublikasikan secara terbuka menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas dana PAD yang digunakan. Hal ini selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Tim Kerja Keuangan memegang peran yang sangat penting dalam proses perencanaan serta penyusunan laporan keuangan terkait pengelolaan Perencanaan Anggaran Daerah (PAD) pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, tim kerja keuangan juga berperan aktif dalam memastikan bahwa perencanaan anggaran berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah di sektor kesehatan. Keberhasilan tim kerja keuangan dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh sinergi antar unit kerja, ketersediaan data yang akurat, serta pemahaman yang baik terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun telah menunjukkan performa yang cukup baik, tim kerja keuangan juga menghadapi beberapa kendala yang bersifat teknis maupun struktural, seperti belum adanya sistem perencanaan dan penatausahaan bagi RS UOBK/UPT BLUD, SDM dan sarana prasarana terbatas, kiriman data dari RS UOBK/UPT BLUD belum dapat dipastikan keabsahannya, adanya sistem penatausahaan baru sehingga tidak dapat mengakomodir potongan pada Gaji dan Tunjangan, serta terdapat beberapa Regulasi BLUD yang tidak relevan dengan kondisi saat ini. Namun demikian, peran tim kerja keuangan dalam mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran dapat dikatakan cukup optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Agar memperkuat peran tim kerja keuangan ke depannya, dibutuhkan upaya yang terencana dan berkelanjutan. Salah satu hal yang paling mendasar adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebaiknya memberikan pelatihan dan pembekalan secara berkala kepada tim kerja keuangan, baik terkait pemahaman terhadap regulasi keuangan terbaru maupun peningkatan keterampilan teknis dalam penggunaan aplikasi keuangan berbasis digital. Hal ini penting agar tim kerja keuangan mampu menyesuaikan dengan perubahan regulasi dan kompleksitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin tinggi.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan perlu lebih dioptimalkan. Sistem informasi keuangan yang terintegrasi akan sangat

kesalahan pencatatan atau pelaporan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur juga sebaiknya melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja tim keuangan, baik melalui mekanisme audit internal maupun eksternal. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengelolaan yang ada serta mendorong peningkatan kualitas kerja secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Isyaky, R. F. A. (2022). Laporan Akhir Kegiatan Magang Di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul (Doctoral dissertation, STIE YKPN).
- Muhtarom, A. (2015). Analisis pad (pendapatan asli daerah) terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten lamongan periode tahun 2010-2015. *Jurnal Ekbis*, 13(1), 9-Halaman.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah.
- Putra, R., Ningsih, S., Irawan, D., Alfisyahri, N., & Permana, K. (2024). Pelatihan Penulisan Laporan Magang untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Akhir Bagi Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Pengabdian Dosen Indonesia*, 1(1), 1-6.
- Suka, T. C. A. G. (2022). Laporan Akhir Magang Kantor BPKPAD (Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah) Kota Binjai (Doctoral dissertation, STIE YKPN).
- Usman, R. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 1(01), 87-103.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.(2025). Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Diakses dari <https://dinkes.jatimprov.go.id>